



## **TESIS**

### **Judul:**

Peranan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemanggilan  
Notaris Oleh Penegak Hukum Pasca Putusan  
Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020

### **Disusun oleh:**

RETNO INDRIANITA PRATIWI  
NIM. 217229202

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2023

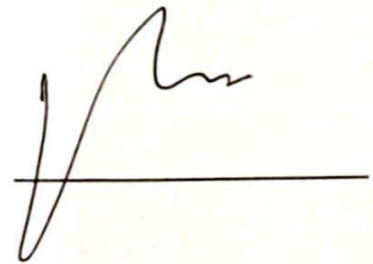
## Persetujuan

Nama : RETNO INDRIANITA PRATIWI  
NIM : 217229202  
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN  
Judul : Peranan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemanggilan  
Notaris Oleh Penegak Hukum Pasca Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 28-Juni-2023

Pembimbing:  
BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum.,  
MKn.  
NIK/NIP: 10215007

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Benny Djaaja', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

## Pengesahan

Nama : RETNO INDRIANITA PRATIWI  
NIM : 217229202  
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN  
Judul Tesis : Peranan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020  
Title : The Role of the Notary Honorary Council in Summoning Notaries by Law Enforcers After the Constitutional Court Decision Number 16/PUU-XVIII/2020

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 20-Juli-2023.

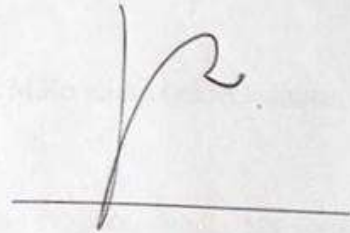
### Tim Penguji:

1. RASJI, Dr., S.H., M.H.
2. BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum., MKn.
3. TJEMPAKA, S.H., M.H., M.Kn., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

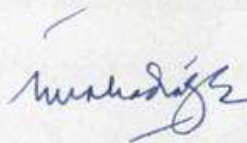
### Pembimbing:

BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum.,  
MKn.  
NIK/NIP: 10215007



Jakarta, 20-Juli-2023

Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., M.Hum.

## ABSTRAK

**JUDUL TESIS** : Peranan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020.

**NAMA MAHASISWA** : Retno Indrianita Pratiwi

**NIM** : 217229202

**KATA KUNCI** : Hak Ingkar Notaris, Majelis Kehormatan Notaris,

**ISI ABSTRAK** :

Dalam kasus ini mengenai pengajuan *judicial review* yang disampaikan Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris (UUJN) ke Mahkamah Konstitusi (MK), untuk menyampaikan bahwa Pasal 66 ayat (1) UUJN untuk kalimat atau frasa dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris kontradiksi dengan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan masalah ialah bagaimana peranan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 dan bagaimana penggunaan hak ingkar oleh notaris di pengadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020. Metode penelitian adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Peranan Majelis Kehormatan Notaris untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum di tengah masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa yang dibutuhkan juga dalam proses pembangunan yang berkaitan dengan profesi Notaris yang sangat membutuhkan perlindungan hukum telah teruji dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020. Penggunaan Hak Ingkar oleh Notaris di Pengadilan telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf f, Pasal 54 dan Pasal 66 dari UUJN di mana Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum berkewajiban menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya serta menjaga kerahasiaan dari para penghadap hal tersebut terdapat dan kewajiban tersebut ada diantara kewajiban lainnya dan penggunaan hak ingkar oleh Notaris di pengadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 berlaku sama sebelum adanya putusan tersebut terhadap profesi Notaris

## ***ABSTRACT***

**THESIS TITLE** : *The Role Of The Notary Honorary Council In Summoning Notaries By Law Enforcers After The Constitutional Court Decision Number 16/PUU-XVIII/2020.*

**STUDENT NAME** : Retno Indrianita Pratiwi

**NIM** : 217229202

**KEY WORDS** : *Notary's right of denial, Notary Honorary Council*

### **CONTENTS ABSTRACT :**

*In this case regarding the submission of a judicial review submitted by the Indonesian Prosecutors Association (PJI) on Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary (UUJN) to the Constitutional Court (MK), to convey that Article 66 paragraph (1) UUJN for the sentence or phrase with the approval of the Honorary Council of Notaries contradicts the 1945 Constitution. The formulation of the problem is what is the position of Honorary Council of Notaries in providing legal protection for Notaries after Decision of the Constitutional Court Number 16 /PUU-XVIII/2020 and how the use of the right of refusal by a notary in court after the decision of the Constitutional Court Number 16/PUU-XVIII/2020. The research method is empirical research, namely research with field data as the main data source, such as the results of interviews and observations. The role of the Notary Honorary Council to ensure legal certainty, binding and protection in the midst of people who need authentic written evidence regarding conditions, events needed is also in the development process related to the Notary profession which really needs legal protection has been tested by the Constitutional Court Decision Number 16 /PUU-XVIII/2020. The use of the Right of Refusal by a Notary in Court has been regulated in the provisions of Article 16 paragraph 1 letter f, Article 54 and Article 66 of the UUJN where a Notary in carrying out his duties and position as a public official is obliged to maintain the secrecy of the deed he made and maintain the confidentiality of the appearers. and this obligation exists among other obligations and the use of the right of refusal by a Notary in a post-trial court Decision of the Constitutional Court Number 16/PUU-XVIII/2020 applies the same before the decision was made against the Notary profession.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, bahwa penulis telah menyelesaikan tugas akhir penulis yang berjudul **PERANAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PEMANGGILAN NOTARIS OLEH PENEGAK HUKUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVIII/2020** . Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H.,M.H.,M.M., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H.,M.H selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Benny Djaja, S.H., M.M, M.Hum, M.Kn selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing, memberikan masukan-masukan positif dan kritik yang membangun sehingga tesis ini mengalami banyak perubahan yang lebih baik.
4. Seluruh Dosen Magister Kenotariatan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Universitas Tarumanagara.

5. Seluruh narasumber yang telah meluangkan waktu untuk penulis melakukan wawancara serta masukan kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan data yang riil untuk tesis ini
6. Kakak-kakak saya Panji Koko Prasetyo, Imelda Priana Apt, S.Farm, Panji Teguh Pramono S.E yang selalu memberikan doa dan dukungan tanpa henti untuk tercapainya tesis ini.
7. Teman-teman Mahasiswa Magister Kenotariatan yang telah berpartisipasi memberikan dukungan moril dan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh civitas akademik Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.
9. Serta semua pihak yang secara langsung terlibat dalam pembuatan tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu di sini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun untuk lebih menyempurnakan lagi tesis ini, sehingga penulis dapat memperbaiki bentuk maupun isi tesis dan menjadi penulisan karya ilmiah yang baik serta mencapai kesempurnaan.

Semoga tesis ini nantinya dapat bermanfaat serta dapat dipergunakan sebagai sumber materi pembelajaran Hukum Kenotariatan di Fakultas Hukum baik oleh pembaca maupun peneliti lain, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum. Harapan penulis, tesis ini dapat diterima oleh masyarakat luas dan dapat

menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembacanya, sehingga dapat bermanfaat bagi untuk membangun proses hukum di Indonesia yang lebih baik dan adil di kemudian hari.

Akhirnya dengan penuh penghormatan dan kerendahan hati, tesis ini penulis persembahkan kepada Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara, semoga bermanfaat bagi ilmu hukum.

Jakarta, Juli 2023

Penulis

Retno Indrianita Pratiwi



## Pernyataan

Nama : RETNO INDRIANITA PRATIWI  
NIM : 217229202  
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN  
Judul : Peranan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28-Juni-2023

Yang menyatakan



RETNO INDRIANITA PRATIWI  
NIM. 217229202

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b><i>ABSTRACT</i></b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Kerangka Konseptual .....	11
1. Definisi Notaris .....	13
2. Definisi Akta .....	14
3. Kewajiban Notaris .....	15
4. Majelis Kehormatan Notaris .....	18
5. Kode Etik Notaris .....	19
6. Hak Ingkar Notaris .....	23

F. Metode Penelitian .....	24
1. Jenis Penelitian .....	24
2. Jenis Pendekatan.....	25
3. Jenis dan Sumber Data .....	27
4. Teknik Pengumpulan Data .....	28
5. Analisis Bahan Hukum .....	31
G. Sistematika Penulisan .....	33
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Definisi Notaris .....	36
B. Posisi Notaris sebagai Pejabat Umum.....	38
C. Kewajibab dan Kewenangan Notaris .....	40
D. Majelis Pengawas Notaris .....	48
E. Dewan Kehormatan Notaris.....	58
F. Hak Ingkar Notaris.....	72
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN</b>	
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020	79
B. Hasil Wawancara dan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD).....	83
<b>BAB IV: ANALISIS HASIL PENELITIAN</b>	
A. Peranan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020.....	106
B. Penggunaan Hak Ingkar oleh Notaris di Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020.....	131

<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	150
B. Saran.....	152
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>153</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>160</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2: Surat Tugas Tesis
- Lampiran 3: Berita Acara Bimbingan Tesis
- Lampiran 4: Surat Keterangan Turnitin dan Hasilnya
- Lampiran 5 : Bukti Publish Jurnal
- Lampiran 6: Surat Permohonan Wawancara Bapak Taufik Hidayat S.H (Majelis Kehormatan Notaris)
- Lampiran 7 : Bukti Wawancara dan *Forum Grup Discussion*
- Lampiran 8: Salinan Putusan

